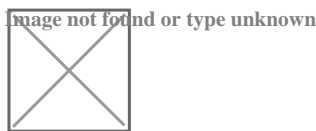


## Akselerasi Inklusi Keuangan Dorong Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat



Pemerintah terus berupaya mengencangkan edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi.

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% pada tahun 2021, yang berarti lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 81,4%. Namun, di sisi lain, indeks literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Untuk itu, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memfasilitasi *Focus Group Discussion* dalam rangka edukasi dan sosialisasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Pesantren Mansyaul Huda 02 dan Pesantren Al-Islah di Tuban, Jawa Timur, Jumat (1/04).

Edukasi dan sosialisasi bagi kalangan santri dan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pesantren ini dilakukan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Edukasi dan sosialisasi di lingkungan pesantren ini menjadi penting karena Indonesia memiliki Lembaga Pesantren yang sangat besar yaitu lebih dari 30 ribu pesantren. Sebagian pesantren pun memiliki potensi dibidang pertanian, peternakan, perikanan, serta Usaha Mikro Kecil.

“Dari sisi pesantren, inklusi keuangan ini sangat strategis dalam pemberdayaan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan Kyai, Pengurus, Santri, dan Masyarakat sekitar Pesantren,” ungkap Deputy Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir yang disampaikan secara virtual pada kesempatan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Riyadi pada kesempatan tersebut menyampaikan agar sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dapat terus direalisasikan.

“Diharapkan forum-forum seperti ini dapat mendorong akselerasi inklusi keuangan dan memberikan nilai tambah ekonomi di level rumah tangga,” tambah Riyadi.

Sebagai informasi, kegiatan edukasi dan sosialisasi tersebut juga merupakan hasil kolaborasi dengan mitra keuangan inklusif antara lain dari Perum Bulog, LPDB-KUMKM, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pupuk Indonesia, PT Telkom, dan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian. Dalam kegiatan tersebut, diperoleh poin penting yaitu berupa rencana dari para mitra untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan.

Pada kesempatan yang sama, telah dilaksanakan pula acara simbolis inklusi keuangan berupa penyerahan tabungan emas kepada pengurus di kedua Pondok Pesantren tersebut oleh Pegadaian Syariah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Bendahara Forum Kontak Majelis Taklim Jawa Timur, Perwakilan mitra dari BUMN, Pimpinan/Pengurus Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 dan Al-Islah, serta Tim Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (dep1/ltg/fsr)